

## Pendekatan Pendidikan Multikultural dalam Mengelola Keragaman Masyarakat Multietnik

Rusmin Rusmin<sup>1\*</sup>, Saepudin Mashuri<sup>2</sup> & Firdiansyah Alhabsyi<sup>3</sup>

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : [rusminaminnudin@gmail.com](mailto:rusminaminnudin@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

### KATA KUNCI

**Mengelola Keragaman,  
Masyarakat Multietnik,  
Integrasi Sosial, Pendidikan  
Multikultural**

Tulisan ini mengkaji tentang keragaman masyarakat multietnik dengan tujuan mengungkapkan peran strategis pendidikan multikultural dalam mengelola keragaman budaya untuk menguatkan kesatuan sosial masyarakat multietnik di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode telaah literatur (Zed, 2004: 2-3) dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema kajian, seperti; buku, jurnal, ensiklopedi, hasil penelitian, dan informasi media massa.

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa keragaman budaya masyarakat multietnik memunculkan beragam fenomena sosial sehingga mudah memicu konflik horizontal dan vertikal. Keragaman dapat menjadi kekuatan integrasi (*integrating force*) yang menyatukan komunitas masyarakat yang berbeda di suatu bangsa. Namun, pada saat yang sama, keragaman budaya dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar daerah, ras, etnik, agama dan nilai-nilai hidup yang dianut komunitas suatu bangsa.

Realitas sosial masyarakat dengan heterogenitas yang tinggi membutuhkan pendidikan multikultural dengan mengedepankan sikap terbuka dalam menerima setiap perbedaan. Seluruh manusia berkewajiban menumbuhkembangkan kesadaran dan sikap multikultural, jika ingin hidup harmoni dalam perbedaan. Mereka yang memiliki sikap multikultural berkeyakinan, bila perbedaan tidak mampu dikelola dengan baik pasti menimbulkan konflik. Sebaliknya, jika perbedaan mampu dikelola dengan baik, maka akan menjadi khasanah yang potensial untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sampai saat ini, pendidikan multikultural dianggap sebagai salah satu pendekatan penting dalam mengelola keragaman seluruh bidang kehidupan sosial masyarakat multietnik, seperti: bidang politik, agama, ekonomi, budaya, dan khususnya dimensi perbedaan etnosentrisme. Pendidikan multikultural telah menunjukkan peran fungsionalnya dalam mengurangi konflik sosial berlatar etnik yang kerap muncul di tengah masyarakat dan lembaga pendidikan yang berwajah pluralisme sekaligus merekatkan integrasi sosial masyarakat multietnik di Indonesia.

### 1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya, memiliki keragaman etnis yang perlu dikelola melalui pendekatan pendidikan multikultural. Banyaknya suku, budaya dan agama menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kondisi ini sekaligus menunjukkan realitas sosial masyarakat Indonesia sangat heterogen dari segala aspeknya. Menurut Agus Ahmadi, keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya masing-masing yang memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. (Ahmadi. A., 2019).

<sup>1</sup> Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

<sup>2</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

Keragaman latar belakang sosial, seperti: daerah, budaya, ekonomi, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Bagi sebuah negara modern seperti Indonesia, bukan hanya berwujud sebuah unit geopolitik semata, tetapi dalam kenyataannya mengandung keragaman kelompok sosial dan sistem budaya yang tercermin pada keanekaragaman bangsa.

Menurut Anderson dalam Brata Ida Bagus, melalui perjalanan sejarah dan berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan keanekaragaman budaya. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia mengalami proses dan jalan berliku-liku menuju satu komunitas yang diidealkan. Berawal dari hubungan antar kelompok etnis yang tersebar di seluruh kawasan Nusantara sampai terbangun satu komunitas bernegara yang lebih utuh. Kenyataan ini juga diperkuat oleh aktivitas silang yang saling mendekatkan antara berbagai kelompok etnis tersebut, berkat pengaruh persebaran budaya dan agama besar yang datang ke Indonesia. (Anderson, 2016)

Mulyana dalam Agus Ahmadi, menyebutkan bahwa dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar etnik, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar etnik yang memakan korban jiwa. Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan elit politik, bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi. Persaingan antar suku ini menimbulkan peristiwa yang berimbas kerusuhan yang mengatasnamakan etnik dan agama yang masih muncul di berbagai wilayah NKRI sampai saat ini. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan bangsa dengan transparan mudah diamati. Masih teringat peristiwa-peristiwa pada beberapa tahun lalu seperti konflik di Ambon, Papua dan Poso menjadi api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa meledak, walaupun berkali-kali dapat diredam. Konflik sosial tersebut, bukan saja telah merenggut banyak korban jiwa, tetapi juga telah menghancurkan harta benda dan tempat ibadah. Untuk mengatasi konflik sosial berlatar perbedaan etnik, maka penting melibatkan lembaga pendidikan termasuk pendidikan multikultural sebagai pendekatan membangun sikap damai dalam perbedaan sebagai resolusi konflik (Mashuri, Sagaf, Nurdin, Paozia, Yusran, 2021).

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Makna Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural**

Bikhu Parekh memaknai multikulturalisme dengan perbedaan dan keragaman masyarakat sebagai realitas kultural yang perlu dikelola berdasarkan falsafah, nilai, prinsip, norma dan pandangan normatif (Parekh, 2008). Multikulturalisme merupakan ideologi yang menggaungkan perbedaan budaya dan agama sehingga mendorong terciptanya pluralisme budaya di masyarakat (Suparlan, 1982).

Melalui interaksi sosial interkultural, praktik penghormatan atas perbedaan daerah, etnis, budaya, agama, fisik, bahasa dan kondisi ekonomi yang menjadi realitas obyektif masyarakat majemuk akan mudah diamati. Apakah individu atau komunitas yang berbeda mampu saling memberikan penghormatan dengan mengedepankan cara pandang multikulturalis agar dapat mengembangkan sikap hidup yang integratif dan damai dalam keragaman yang dimiliki.

Sedangkan pendidikan multikultural menurut Banks memiliki tiga makna, yaitu: (1) Sebagai ide atau konsep; (2) Sebagai gerakan pembaharuan pendidikan; (3) Sebagai proses mencapai kesetaraan dalam pendidikan (Banks and Banks, 2012). Pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok sebagai usaha yang mengarahkan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik untuk menghargai pluralitas dengan cara yang humanistik. Menurut Ambarudi dalam Lukmanul Hakim, pendidikan multikultural mengandung makna bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan. Kondisi ini mempunyai implikasi pada peserta didik agar tidak terbiasa mempermasalahkan perbedaan dalam bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, agama, ras, maupun adat istiadat yang ada.

### **2.2. Prinsip, Dimensi dan Pendekatan Pendidikan Multikultural**

Pendidikan multikultural menurut Tilar memuat tiga prinsip utama, yakni: (1) Prinsip paedagogik kesetaraan manusia; (2) Prinsip mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan; (3) Prinsip menerima arus globalisasi sebagai keniscayaan dengan memahami arah-arrah nilai keindonesian.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi gambaran pendidikan multikultural sebagai proses penciptaan manusia yang terus berproses dan terbuka terhadap keragaman, serta siap menerima arus globalisasi pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia yang terbuka terhadap keragaman dan siap menerima arus globalisasi dalam seluruh aspek kehidupan sosial berbangsa dan bernegara (Pitoyo dan Triwahyudi, 61-65). Sejalan dengan prinsip-prinsip di atas, dimensi pendidikan multikultural disebutkan oleh James A. Banks (Larasati, 2015) dengan lima ciri utama, yakni :

- a. Prinsip *Content integration* (Integrasi isi/materi), proses mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep mendasar dan hakikat yang menggeneralisasikan pada teori mata pelajaran/disiplin ilmu tertentu.
- b. Prinsip *knowledge construction process* (konstruksi atas pengetahuan), sebagai proses untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin), dalam hal ini peserta didik akan diarahkan untuk memahami beragam perspektif untuk dirumuskan menjadi menemukan intisari sebagai satu kesimpulan.
- c. Prinsip *equity paedogogy* (pendidikan yang sama/adil atau kesetaraan dalam pelayanan pendidikan), sebagai proses menyesuaikan metode, teknik pengajaran dengan cara belajar peserta didik dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik yang beragam baik segi ras, suku, agama, jenis kelamin, budaya ataupun kebutuhan khusus yang dapat memberikan rasa persamaan dalam menerima pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran dilakukan secara adil dalam bentuk kerjasama (*cooperative learning*) dan bukan cara-cara yang kompetitif (*competitive*).
- d. Prinsip *Prejudice Reduction* (pengurangan atas prasangka), proses mengidentifikasi karakteristik ras/etnik peserta didik dengan menentukan metode pengajaran. Hal ini akan membantu dalam proses adaptasi pembelajaran dan jauh dari sikap subyektif.
- e. Prinsip *Empowering School Culture And Social Structure* (pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial), satu proses dengan melatih peserta didik dalam berkelompok untuk berpartisipasi dalam keanggotaan olah raga, kegiatan sosial, berinteraksi dengan seluruh elemen pegawai/staf/karyawan yang berbeda etnis, ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi tatap muka yang komunikatif, berkelanjutan sehingga tercipta rasa memiliki dan tumbuhnya sikap toleransi.

Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, pendidikan multikultural menurut Levinson memiliki lima pendekatan dalam membentuk sikap multikultural peserta didik, yaitu: (1) Pendekatan yang menekankan perbedaan secara kultural; (2) Pendekatan relasi antara manusia; (3) Pendekatan kajian kelompok tunggal; (4) Pendekatan multikultural; (5) Pendekatan dengan metode rekonstruksi sosial.

### 2.3. Peran dan Tujuan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultur memiliki peran yang strategis dalam proses penanaman dan transfer nilai-nilai pada masyarakat yang multikultur. Diantara nilai-nilai multikultur yang dapat ditanamkan, yaitu: demokrasi, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, kedamaian, sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman. Dalam kerangka ini, pendidikan nasional meletakkan satu prinsip bahwa: “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” (Khoiruddin, 2018). Pendidikan sebagai proses pembudayaan menjadi hakikat tertinggi dari tujuan pendidikan agar anak didik menjadi manusia yang sempurna, yakni kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pandangan ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan multikultural untuk pengembangan segenap potensi manusia yang menghargai pluralitas budaya, etnis, suku, dan agama.

Tujuan Pendidikan yang berbasis multikultural disebutkan Ibrahim dalam (Hakim. L., 2019) sebagai berikut: (a) Pendidikan multikultural memfungsikan peranan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dalam memandang keberadaan peserta didik yang beraneka ragam; (b) Pendidikan multikultural membantu peserta didik dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (c) Pendidikan multikultural membantu dalam soal ketahanan

peserta didik agar dapat mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; (d) Pendidikan multikultural membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif tentang perbedaan kelompok dan etnis.

### **3. Methodologi**

Kajian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan analisis konten dengan menelaah berbagai sumber yang berhubungan dengan tema kajian ini, seperti: buku, jurnal, berita media massa, hasil penelitian, dan ensklopedi. Penulis mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisa informasi-informasi terkait untuk menyusun suatu gagasan yang utuh mengenai kajian yang diteliti.

Secara teknik, penulis melakukan klasifikasi sumber kajian yang berkaitan dengan pengelolaan keragaman etnik dalam menguatkan integrasi sosial masyarakat majemuk menurut perspektif pendidikan multikultural yang menjadi fokus penelitian ini. Perpaduan antara hasil telaah sumber-sumber tertulis dan pengamatan terhadap fenomena sosial keagaman masyarakat multikultural di Indonesia menjadi kesatuan yang utuh dan saling melengkapi data dari kajian tema ini.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Perkembangan Keragaman Etnik di Indonesia**

Sejak kemerdekaan Indonesia, data tentang etnisitas sangat terbatas, bahkan sensus penduduk yang oleh Pemerintah Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Baru belum menyentuh etnisitas (BPS, 2011). Kondisi ini terkait dengan kebijakan politik Pemerintah Indonesia yang berpandangan bahwa perbedaan suku yang dibesar-besarkan merupakan sebuah persoalan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pemerintah pun berhati-hati dalam hal ini. Melalui sensus penduduk yang dilaksanakan BPS, pemerintah menghapus pertanyaan mengenai etnisitas dengan alasan pertanyaan tersebut akan mendorong sikap sukuisme dan membahayakan persatuan bangsa.

Persebaran suku (etnik) di Indonesia merupakan salah satu permasalahan kependudukan dengan persebaran penduduk yang tidak merata. Dalam upaya pemerataan penduduk dan pembangunan, pemerintah melanjutkan program yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial-Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga perkebunan di pulau-pulau Indonesia yang masih jarang penduduknya. Program kolonisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia dengan program transmigrasi.

Senada dengan pendapat Tirta Sudarmo, program transmigrasi ini telah dilaksanakan utamanya pada era pemerintahan Orde Baru dengan intensif. Program ini bertujuan melakukan pemerataan penduduk dari pulau yang padat penduduk menuju pulau yang berpenduduk jarang. Implikasinya pada komposisi penduduk yang menjadi lebih heterogen di pulau tujuan dan menciptakan proses akulturasi budaya sehingga terjadi variasi suku dan struktur masyarakat yang rawan konflik.

Data Kementrian Riset dan Teknologi Indonesia tahun 2010 melaporkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia merupakan konflik horizontal yang berasaskan pada isu agama, etnis dan faktor tingkat kesejahteraan yang tidak seimbang. Beberapa penyebab terjadinya konflik sosial diantaranya: (1) Tidak seimbangan dalam pembangunan; (2) Pengerukan sumber daya alam; (3) Kekerasan pada rakyat; (4) Kuatnya etnisitas pada masyarakat tempatan, (5) Jauh dari pusat pemerintahan, (6) Modernisasi yang keliru atau dipaksakan; (7) Distribusi ekonomi, posisi, atau jabatan yang yang tidak seimbang; (8) Persepsi yang keliru dari pemerintah pusat terhadap masyarakat tempatan. Selain itu, isu pribumi (Indonesia asli) dan non-pribumi (China keturunan), serta isu agama diselipkan menjadi bumbuh tambahan pada permasalahan dalam hubungan etnik di Indonesia yang berujung kepada konflik (Tajuddin dan Yeyeng, 2017).

### **4.2. Mengelola Keragaman Masyarakat Multietnik Perspektif Multikultural**

Membangun masyarakat multietnik dalam keragaman budaya berarti menempatkan kesetaraan dalam perbedaan sebagai posisi sentral dalam ideologi yang dibangun. Multikulturalisme menekankan pada gagasan kesetaraan dan saling menghargai dengan mempertimbangkan keberadaan budaya lainnya. Lebih lanjut, multikulturalisme di Indonesia dapat diarahkan untuk menguatkan kesadaran atas identitas bersama, yaitu nasionalisme. Kemajemukan budaya dianggap sebagai ciri yang melekat pada bangsa Indonesia dan masyarakat multi etnis sebagai penggerak untuk mencapai tujuan bersama melalui ideologi “Bineka Tunggal Ika” yang dibentuk secara historis dan memiliki tujuan yang sama, yaitu persatuan Indonesia.

Menurut Lukmanul hakim, konsep pendidikan multikultural dapat digunakan sebagai pendekatan menjaga persatuan dan integrasi sosial masyarakat multietnik dengan berbasis pada:

#### **a. Prinsip dan Dimensi Pendidikan Multikultural**

Pengelolaan keberagaman masyarakat multietnik berdasarkan prinsip pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan strategi, yaitu: (a) Menjadikan ragam karakteristik pada peserta didik/masyarakat sebagai alternatif untuk menghimpun dan meletakkan perbedaan sebagai satu kekayaan budaya; (b) Program pendidikan multikultural dapat juga didesain dalam sebuah rencana program kerja dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Misalnya, menghadirkan pendidikan tentang corak kebudayaan dalam suatu kegiatan atau perlombaan, misalnya: kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, festival kesenian dengan bahasa daerah.

Penerapan pendidikan multikultural menurut Banks dalam (Munadlir, 2016) akan terlihat pada situasi lembaga pendidikan sebagai berikut: (a) Aktivitas yang respek terhadap berbagai pengembangan kreativitas dan aktivitas sekolah/lembaga terhadap keragaman etnik; (b) Pengembangan kohesivitas berdasarkan partisipasi bersama dari beberapa kelompok budaya dan etnis; (c) Penerapan yang sama dalam memberi kesempatan maksimal untuk seluruh individu dan kelompok; (d) Kerelaan lembaga/sekolah dalam memfasilitasi perubahan konstruktif yang dapat meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi.

Bertemunya berbagai perbedaan budaya, tradisi dan kegiatan keagamaan dalam satu lokasi menjadi kekayaan pengetahuan tentang pendidikan multikultural. Perbedaan yang terdapat pada kelompok selayaknya mendapat ruang ekspresikannya. Pandangan James A. Banks di atas dapat menjadi tolak ukur dalam menerapkan program-program pendidikan multikultural dengan corak kebudayaan dan karakteristik keragaman agar mampu menumbuhkan semangat kebhinekaan dan prinsip toleransi dalam seluruh dimensi kehidupan sosial masyarakat majemuk.

#### **b. Tujuan dan Kompetensi Pendidikan Multikultural**

Tujuan penerapan pendidikan multikultural dalam mengelola keragaman budaya masyarakat multietnik disebutkan oleh Batubara & Ariani dalam Lukmanul Hakim sebagai berikut: (a) Melakukan analisis faktor-faktor potensial yang bernuansa multikultural, seperti: kompetensi mata pelajaran, kompetensi guru, kompetensi latar belakang, dan kompetensi materi-materi yang relevan; (b) Melakukan penetapan variasi atas pendekatan, metode, teknik dan media pembelajaran yang terkoneksi dengan tujuan pendidikan multikultural, seperti: nilai budaya berupa kesenian, tradisi/adat istiadat, bahasa masing-masing peserta didik, serta nilai-nilai keagamaan; (c) Melakukan penyusunan pembelajaran yang mempertimbangkan keanekaragaman, kondisi fisik, mental, agama, serta bahasa dari peserta didik.

Upaya lain yang dapat dilakukan berkaitan dengan kompetensi multikultural setidaknya datang dari para guru, pembina atau pengelola lembaga pendidikan. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Elashmawi dan Harris dalam (Munadlir, 2016) disebutkan sebagai berikut. (a) Guru/pembina memiliki tingkat hubungan sosial yang luas; (b) Guru/pembina bersifat terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman peserta didik; (c) Guru/pembina memiliki sikap menerima perbedaan dalam hal disiplin ilmu, latar belakang ras dan gender; (d) Guru/pembina bersedia untuk memfasilitasi peserta didik yang minoritas; (e) Guru/pembina bersedia untuk dapat berkolaborasi dan berkoalisi dengan pihak manapun yang berorientasi pada program masa depan yang sifatnya multikultur.

Dengan demikian, pengelolaan keragaman budaya masyarakat multietnik melalui pendekatan pendidikan multikultural mampu menguatkan integrasi sosial dengan menganut prinsip menjunjung tinggi keragaman, harkat dan martabat manusia dengan menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu: nilai kesetaraan, sikap toleransi, pluralisme, dan sikap demokrasi (Munadlir, 2016).

## **5. Kesimpulan**

Pengelolaan keragaman masyarakat multietnik memiliki signifikansi besar terhadap penguatan integrasi sosial masyarakat multikultural di Indonesia. Mengelola keragaman merupakan salah satu strategi membangun masyarakat multietnik yang

integratif dalam perbedaan budaya yang dimiliki. Pengelolaan keragaman masyarakat multietnik menempatkan kesetaraan dan keadilan sebagai prinsip sentral.

Ideologi multikulturalisme menekankan pada gagasan kesetaraan dan saling menghargai perbedaan dengan mengakui eksistensi etnis, agama dan budaya lain. Sebagai turunan dari multikulturalisme, pendidikan multikultural berperan signifikan dalam mengelola kemajemukan budaya masyarakat multietnik sejalan dengan falsafah Bineka Tunggal Ika yang memiliki akar historis dan tujuan yang sama untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural penting digunakan sebagai pendekatan dalam upaya menjaga integrasi dan kohesi sosial masyarakat Indonesia yang multietnik dengan mengedepankan prinsip, dimensi dan tujuan pendidikan multikultural.

## Referensi

- Akhmadi, Agus. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious: Moderation in Indonesia Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55
- Banks, James A. and Cherry A. McGee Banks. (2010). *Multicultural Education: Issues and Perspective*. Ed.VII, USA: Wiley & Sons, Inc. 2010.
- Brata, Ida Bagus. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa, *Jurnal Bakti Saraswati*, 15(1), 9-16
- Hakim, Lukmanul. (2019). Paradigma Pendidikan Multikultural dalam Keragaman Mahasiswa Nusantara Di Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) Universitas Teknologi Sumbawa, *Jurnal tambora*, 3(2), 61-65
- Khairuddin, Ahmad. (2018). Epistemologi Pendidikan Multikultural di Indonesia, *IJTIMAIYAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 2(1)
- Levinson, David L., (2002). *Education and Sociology: an Encyclopedia*. New York: Routledge Farmer.
- Mashuri, Saepudin. (2021). **Integrasi Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Daerah Pasca Konflik**, *Jurnal Pendidikan Multikultural*, Volume 5 Nomor 1, Februari.
- Mashuri, S., Sagaf, S., Nurdin, Paozia, Yusran, Schools Strategies in Countering Religious Radicalism in Post-Conflict Community in Poso Regency Central Sulawesi, Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 4(1): 09-20. DOI: 10.32996/jhsss.2022.4.1.2
- M.D., Mahfud. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indoenesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pitoyo, Agus Joko, and Hari Triwahyudi. (2018). Dinamika Perkembangan Etnis Di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara. *Jurnal Populasi*, 25(1), 64-81
- Rahim, Rahmawaty. (2012). Signifikansi Pendidikan Multikultural terhadap Kelompok Minoritas. *Jurnal Studi Keislaman*, 12(1) (2012), 161-82
- Sulaiman, S., Imran, A., Hidayat, B. A., Mashuri, S., Reslawati, R., & Fakhurrrazi, F. (2022). Moderation religion in the era society 5.0 and multicultural society: Studies based on legal, religious, and social reviews. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5), 180-193. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2106>
- Suparlan, Parsudi. (1982). *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*. Jakarta: Depag RI.